**BAB II**

**KONDISI SULAWESI SELATAN**

**TAHUN 1930-1950**

1. **Kondisi Sulawesi Selatan Masa Kolonial Belanda Tahun 1930-1942**

Keadaan alam Sulawesi Selatan terletak di peta Kepulauan Indonesia Sulawesi terletak di tengah-tengah, di sebelah Baratnya terletak pulau Kalimantan dan Pulau Sumatra di sebelah Timurnya terdapat pulau-pulau Maluku dan Irian Jaya. Sepintas lalu bentuk pulau Sulawesi menyerupai huruf “K”.

Pada zaman Hindia-Belanda, pulau ini disebut Selebes atau disebut Celebes. menurut cerita, nama itu berasal dari kata “Selebassi” (bahasa Makassar) artinya Keris Besi.[[1]](#footnote-1) Propinsi Sulawesi Selatan terletak di jazirah selatan Pulau Sulawesi pada posisi antara 00 120 Lintang Utara dan 80 Lintang Selatan Serta antara 116 48’-112 36’ Bujur Timur. [[2]](#footnote-2)

Wilayah propinsi ini berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Tengah di sebelah utara, Teluk Bone di sebelah timur, Selat Makassar di sebelah barat. Luas wilayah mencapai 6. 248. 254 Hektare atau sekitar 42 persen dari luas pulau Sulawesi dan 4,1 persen dari luas seluruh kepulauan Indonesia.[[3]](#footnote-3)Karena letaknya yang demikian itu, Sulawesi Selatan memiliki posisi maritim. Posisi inilah yang memberi peluang bagi penduduknya untuk hidup sebagai pelaut, baik sebagai nelayan maupun sebagai pelayar. Permukaan buminya terdiri atas daerah-daerah pegunungan dengan lapisan tanah yang subur. Dari pegunungan mengalir sungai-sungai yang mengairi dataran dan lembah, membentuk hamparan padang rumput, tanah-tanah, pesawahan, diselingi hutan belukar yang menghijau.[[4]](#footnote-4)

Sulawesi Selatan merupakan wilayah dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi dibanding Sumatra Timur, Kalimantan Timur, dan Manado. Jumlah penduduk di Sulawesi Selatan pada tahun 1930 terdapat 3.063.217 jiwa. Pertumbuhan penduduk itu disebabkan membaiknya kesehatan yang berdampak pada menurunnya angka kematian. Selain itu, juga disebabkan masuknya penduduk dari luar yang datang untuk membuka perkebunan kelapa.[[5]](#footnote-5)

Kondisi Sosial-budaya di daerah Sulawesi Selatan dengan proses demokratisasi yang tengah dibangun. Berdasarkan asumsi bahwa proses perubahan sosial-budaya merupakan sebuah proses yang berjalan secara bertahap atau sedikit demi sedikit, dan tidak dapat berlangsung sekaligus dalam beberapa hari, bulan atau tahun saja, tetapi memerlukan waktu yang cukup lama, maka proses perubahan yang tengah berlangsung; yaitu demokratisasi tentu juga akan berjalan seperti itu. Di situ berbagai relasi sosial dan nilai budaya yang lama tentu masih akan bekerja dan berpengaruh terhadap proses perubahan yang tengah terjadi.[[6]](#footnote-6)

Tradisi kehidupan orang bugis Makassar berputar di sekitar tiga konsep yang satu sama lain terkait erat dan secara amat menonjol membentuk jati diri dan kehormatan masyarakat suku ini, ketiga konsep tersebut yaitu siri’, pesse/pace dan syara (Syariat Islam). Ketiganya telah mentradisi dari abad ke abad, dan tampaknya, semakin tidak mudah dimakan usia.[[7]](#footnote-7)

*Siri’,*dalam tradisi masyarakat Bugis Makassar, adalah harga diri, martabat sebagai seorang manusia. Mereka berani berkorban demi *siri’* dan ingin tampil gagah karena memiliki *siri’* itu. ”kita masih mau hidup karena *Siri’*,”demikian prinsip mereka. Maka orang Bugis-Makassar pun, tidak boleh mengalami apa yang disebut *mate siri’* (Kehilangan harga diri). Bila ini terjadi, maka hanya kematian yang bisa menjadi jalan pembebasan terbaik dari aib. Mati karena membela *siri’,*bagi mereka, adalah mati terhormat, mati secara kesatria.

Demikian pentingnya arti dan makna siri’ dalam kehidupan sosial budaya orang Bugis Makassar tersebut, sehingga setiap individu pendukungnya senantiasa berusaha membina sekaligus mempertahankan nilai-nilai tradisional yang dapat memungkinkan tegak dan tegarnya siri’ sepanjang masa. Siri’ diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya secara berkesinambungan, terutama melalui proses sosialisasi dalam lingkungan keluarga dan rumah tangga.

Selain siri’ dan passe yang telah menunjukkan kekuatannya sebagai alat pemersatu, pencipta solideritas kelompok, dan penjaga martabat paling ampuh, masih ada satu kekuatan lain yang sudah lama hidup dan nenapasi masyarakat Sulawesi Selatan. Seperti halnya Aceh dan Minangkabau, dalam sejarah, Sulawesi Selatan dikenal sebagai wilayah yang sangat *Islamized*[[8]](#footnote-8)

Sulawesi Selatan adalah siri’ dan pinisi. Demikian barangkali pesan umum yang serta merta mewarnai benak banyak orang setiap kali mendengar nama provinsi di semenanjung sebelah selatan Pulau Sulawesi itu. Hal ini memang cukup bisa dimengerti, mengingat banyaknya publikasi mengenai kedua soal itu berkaitan dengan keberadaan orang Sulawesi Selatan. Memang, baik budaya siri’ maupun tradisi pinisi, terutama hanya dikenal di kalangan masyarakat Bugis dan Makassar. Namun mengingat keberadaan kedua suku ini yang merupakan penduduk mayoritas di Sulawesi Selatan dari empat suku yang ada (dua suku lainnya adalah Toraja dan Mandar), tak berlebihan kiranya kalau dikatakan bahwa hal tersebut telah menjadi ciri khas masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya.[[9]](#footnote-9)

Siri’ bagi orang Sulawesi Selatan atau suku Bugis-Makassar khususnya, adalah konsep atau pemahaman hidup yang berkaitan dengan malu, kehormatan dan harga diri. Dalam implementasinya, pemahaman ini sering tampak berupa kecenderungan untuk membunuh pihak yang dipandang telah menyinggung kehormatannya atau harga diri tersebut. Sehingga, secara sederhana dapat dikatakan bahwa siri’ adalah perasaan malu yang memberi kewajiban moral untuk membunuh pihak yang membunuh kehormatan dan harga diri tersebut. Beberapa ungkapan seperti “hanya untuk siri’ itu sajalah kita tinggal di dunia” atau “mati dalam siri’ yang kurang lebih berarti rela mengorbankan nyawa demi menegakkan martabat diri, agaknya bisa lebih memperjelas makna siri’ di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan.

Sedangkan Pinisi, seperti diketahui, adalah perahu khas sulawesi Selatan yang meski sangat sederhana dan biasanya terbuat dari kayu, namun sering digunakan untuk mengarungi lautan luas, dan orang Sulawesi Selatan telah menunjukkan kepiawaiannya melayari lautan dengan perahu sederhana ini.[[10]](#footnote-10)

Dalam konteks ini, maka yang kemudian adalah bagaimana pertemuan nilai-nilai di balik budaya siri’dan tradisi pinisi itu termanifestasi dalam realitas kehidupan sehari-hari masyarakat Sulawesi Selatan serta sekaligus menjadi kekhasan daerah tersebut di bidang politik, pemerintahan, hukum, maupun penerangan dan media masa dari budaya siri’, misalnya, hal yang penting yang terutama yang paling menonjol terlihat adalah bagaimana masyarakat sulawesi selatan cenderung menempatkan harga diri dan kehormatannya baik selalu pribadi maupun pada kelompok pada posisi yang tertinggi di banding kepentingan apapun. Bertemu dengan nilai ketegaran menghadapi tantangan yang ada pada tradisi pinisi, maka hasilnya adalah keteguhan dalam memegang sikap atau prinsip bahkan sekalipun hal itu seringkali harus menantang resiko-resiko atau hambatan yang tidak kecil .

Sejak lama Islam sudah tampil sebagai sebuah kekuatan ampuh dikawasan ini. Masyarakatnya sungguh-sumgguh berpegang teguh pada ajaran yang diberikan agama ini. Bahkan ketika masih berlangsung pemerintahan Bone, kerajaan Luwu, kerajaan raja-raja, dulu ia diterima resmi sebagai agama “negara”. Kerajaan Bone, kerajaan Luwu, kerajaan Rangreng Tuwa Wajo, adalah nama-nama yang identik dengan Islam. Selain sebagai alat integrasi sosial dan politik, Islam sekaligus tampil sebagai motivator mereka dalam perjuangan melawan penjajahan. Dalam kehidupan sehari-hari, Islam dengan sangat menonjol dapat memberikan corak bagi kegiatan kemasyarakatan. Disiplin beribadah, sistem pengajian, pelajaran membaca ayat-ayat suci Alquran, berwudhu, gerakan dan bacaan dalam shalat, serta berbagai ketentuan hukum Islam menyangkut halal dan haram, sungguh-sungguh diterapkan dalam keluarga di sini [[11]](#footnote-11)

Seperti halnya siri’ yang tidak saja berarti malu dan harga diri, Islam di samping berfungsi sebagai alat integrasi sosial yang paling ampuh, tidak jarang muncul untuk memperjelas perbatasan satu dengan yang lainnya. Sejarah memang pernah mengungkapkan praktek-praktek perbatasan ini, yaitu ketika 1930-an, Raja-Raja Bone, Gowa dan Luwu-Palopo menolak kehadiran kelompok atau organisasi yang bukan Islam. Kemudian pembentukan kerangka kehidupan Sosial budaya masyarakat Sulawesi Selatan, siri, pesse dan Islam, merupakan tiga serangkai yang secara utuh menapasi kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan. Menjadi pedoman atau falsafah hidup masyarakat, sekaligus tampil sebagai senjata pamungkas guna melawan musuh asing. Bahkan, dapat dikatakan, sejak awal abad ke-20, seluruh wilayah Sulawesi Selatan telah sepenuhnya takluk kepada Belanda dan berada di bawah kekuasaan Belanda. Akan tetapi, tidak berarti bahwa masyarakat Sulawesi Selatan bersedia menerima kekalahan tersebut begitu saja. Seiring dengan maraknya kehidupan berbagai organisasi pergerakan di Pulau Jawa pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, Sulawesi Selatan juga memperlihatkan dinamika kegiatan yang tak kalah serunya. [[12]](#footnote-12)

Tumbuhnya kegiatan sosial politik terutama pergerakan terutama tumbuhnya pergerakan kebangsaan di Pulau Jawa pada awal tahun 1900-an, mempengaruhi para pemuda dan tokoh-tokoh masyarakat Sulawesi Selatan untuk juga mangkit mendirikan organisasi politik kebangsaan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penolakan terhadap Kolonialisme Belanda.

Pada masa pemerintahan Gubernur J.L.M. Swaab (1931-1937) terjadi lagi perubahan penataan wilayah pemerintahan. Perubahan ini dilakukan untuk mengantisipasi mulai berkembang organisasi sosial dan politik di daerah Sulawesi Selatan. Pemerintah Hindia Belanda mulai mendekati kelompok-kelompok bangsawan yang telah ditekan dengan menjalin hubungan dengan menjalin hubungan kerjasama. Tujuan kerjasama adalah agar para bangsawan tersebut tidak dalam kegiatan organisasi sosial, politik yang mulai berkembang, yang dipandang dapat mengancam kekuasaan pemerintahan. Untuk menjalin hubungan kerjasama, pemerintah menawarkan pemulihan kedudukan bekas kerajaan menjadi daerah kekuasaan berpemerintah sendiri.[[13]](#footnote-13)

Perjalanan panjang sejarah telah membuktikan itu perang berkepanjangan melawan penjajah Belanda dan Jepang di masa lalu, lebih terdorong oleh rasa malu karena martabat mereka didinjak-injak penjajah. Prinsip, lebih baik mati daripada martabat dinodai, telah mengakibatkan lahirnya sejarah kegemilangan perlawanan Suku Bugis Makasar dan suku-suku lain di kawasan ini untuk menentang dan melawan kehendak asing[[14]](#footnote-14)

Kondisi perekonomian rakyat daerah Sulawesi Selatan (Sulsel) telah lama mengenal teknologi produksi khususnya pertanian dan perkebunan dan kegiatan perdagangan, jauh sebelum kedatangan bangsa Portugis dan Belanda ke daerah ini. Berbagai macam suku dan kelompok etnis dengan karakteristik sangat dinamis di Sulawesi Selatan, dikenal sebagai penjelajah ulung sejak dahulu kala sekaligus mudah bergaul.

Kehadiran wilayah ini dalam panggung sejarah banyak diwarnai dengan kegiatan perdagangan, terutama yang berkait erat dengan dunia kemaritiman Sulawesi Selatan yang “diwakili” Makassar sejak abad ke-17 sudah terkenal sebagai wilayah strategis bagi dunia pelayaran dan perdagangan di nusantara.[[15]](#footnote-15)

Makassar sudah lama dikenal sebagai pintu gerbang di Indonesia bagian timur. Usaha pemerintahan Belanda menguasai Makassar bukn hanya kepentingan politis smua, tetapi lebih bernuansa ekonomi politik global, yaitu dengan mengimbangi laju monopoli Inggris yang berpangkalan di Singapura. Awal pertarungan kedua bangsa kulit putih itu tidak hanya berusaha menguasai pelabuhan bagi setiap daerah jajahan, tetapi juga dikembangkan komoditi yang laku di pasaran dunia, yang didukung oleh kekuatan industri seperti dibangunnya Olie Fabrieken Insulindo Makassar yang bertujuan untuk mengendalikan spekulan pedang kopra di pasaran dunia.[[16]](#footnote-16)

Itulah sebabnya kontrol Makassar semakin penting, bukan saja menguasai pelabuhan tetapi bagaimana juga Makassar masuk dalam jaringan pasaran kopra dunia. Masuknya Makassar dalam pasaran dunia membawa ekonomi di Indonesia bagian timur terintegrasi secara regional. Depresi ekonomi dunia di tahun 1930-an membawa nilai ekspor kopra Makassar menurun. Peran pemerintah Belanda semakin kuat, bahkan kebijakan tersebut berlanjut sampai tahun 1950-an kontrol politik terhadap ekonomi semakin kuat sehingga masalah ekonomi mencuat menjadi isme politik regional.[[17]](#footnote-17)

Hubungan perdagangan mula-mula berlangsung dengan pedagang Jawa Timur setelah wilayah ini menjadi taklukan Kerajaan Majapahit pada awal abad XIV, dan selanjutnya meluas tidak hanya dengan pedagang-pedagang dari berbagai Nusantara tetapi kemudian berkembang sampai ke Madagaskar dan Persia.

Pada masa Sulawesi Selatan dalam penguasaan pemerintahan Hindia Belanda sampai terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1930-an. Adalah merupakan keberlanjutan dari periode sebelumnya. Jauh sebelum Sulawesi bagian Selatan telah membina hubungan dengan kekuatan-kekuatan luar baik melalui hubungan politik maupun hubungan perdagangan.[[18]](#footnote-18)

Perkembangan sejarah ekonomi ini pada periode 1900-an-1930-an ini, beberapa tujuan yaitu: pertama, peran diaspora elite politik lokal sejak integrasi ekonomi di Sulawesi Selatan. Kedua, tipologi perdagangan yang dipengaruhi oleh ekspansi politik kolonial di Sulawesi Selatan. ketiga, terjadi perubahan struktur ekonomi di Sulawesi Selatan, dan empat, secara historiografi wilayah Sulawesi Selatan terabaikaikan, sehingga perlu sebuah penelitian yang konfrehensif.[[19]](#footnote-19)

Awal mula kemerosotannya perekonomian Sulawesi Selatan ketika kerajaan Gowa di Makassar mencapai puncak kejayaannya pada pertengahan abad XVII, orang-orang Makassar telah menjalin hubungan dagang dengan Portugis setelah perutusan Portugis dari Malaka menyampaikan kehendak untuk bekerjasama dalam bidang perdagangan dengan kerajaan ini. Kendati hubungan tersebut juga sering diselingi dengan konflik dan peperangan, namun hubungan dagang terus berlangsung sampai kedatangan Belanda

Sejak itu, pengaruh kekuasaan Belanda amat terasa dan meruntuhkan semangat kewirausahaan rakyat Sulawesi Selatan. Politik dagang Belanda yang menerapkan monopoli atas perdagangan hasil bumi dan penguasaan seluruh wilayah dipelabuhan ini, secara sistematis menghancurkan sendi-sendi perekonomian rakyat.[[20]](#footnote-20)

1. **Kondisi Sulawesi Selatan Masa Kolonial Jepang tahun 1942-1945**

Kondisi Sulawesi Selatan pada masa kolonial Jepang, tepatnya Pada tanggal 9 februari 1942 Angkatan Perang Timur Jepang mendarat di Makasar. Mmakassar dijadikan sebagai tempat markas besar Armada Barat Daya Angkatan Laut Jepang, dan pusat pemerintahan Sipil Angkatan Laut untuk Borneo, Sulawesi, Maluku Dan Sunda Kecil. Hanya pada sedikit perlawanan terhadap pendaratan Jepang baik dari pihak garnisun kecil militer Belanda maupun dari penduduk setempat.[[21]](#footnote-21)

Pada tanggal 8 Maret 1942, Komando Angkatan Perang Belanda di Indonesia menyerah tanpa syarat kepada Jepang, pada saat itu pula mulailah masa pendudukan jepang di Indonesia menggantikan pemerintahan Hindia Belanda.

Pada awalnya kedatangan Jepang di sambut dengan baik oleh rakyat Indonesia. Kaum nasionalis di Sulawesi Selatan membentuk suatu panitia untuk menyambut kedatangan pasukan Jepang ke Sulawesi Selatan. Para panitia ini kemudian di angkat oleh Jepang menjadi panitia keamanan umum (Chian Iji Kai) untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum menggantikan para pejabat Belanda yang ditawan. Nadjamoeddin Daeng Malewa diangkat sebagai ketua panitia serta Iwa Kusumasoemantri diangkat sebagai sekretaris. Namun, panitia ini hanya berumur satu bulan kemudia dibubarkan stelah Jepang mendirikan Departemen pemerintahan Sipil Angkatan Laut pada tanggal 10 Maret 1942.

Untuk mendapat simpati dari masyarakat, Jepang bekerjasama dengan para tokoh pergerakan Sulawesi Selatan yang noonkooperatif terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Hal ini bisa dilihat dari beberapa tokoh yang diangkat menjadi penasihat pada pemerintahan sipil angkatan laut Jepang, antara lain Lanto Daeng Pasewang, Haji Sewang Daeng Moentoei, dan Haji Noenoe Daeng Markasi. Selain itu Nadjmudoeddin Deang Mallewa di angkat menjadi anggota Dewan Daerah pada tahun 1943.[[22]](#footnote-22)

Sampai dengan awal tahun 1943 tidak ada bagian propoganda dalam pemerintah Sipil Angkatan Laut di Makassar, tidak terbentuk organisasi massa seperti PUTERA, bahkan *Seinendan* (korps pemuda jaman Jepang) baru didirikan tahu 1944. Pemuda Sulawesi Selatan hanya beberapa bulan sebelum Jepang menyerah, menerima latihan militer untuk menjadi anggota Heihomdan Sinendan. Disamping itu, di Sulawesi Selatan tidak menngenal Romusha yang mengerahkan rakyat untuk kerja paksa sehingga penduduka Jepang di Sulawesi Selatan tidak menimbulkan dampak seperti yang terjadi di Jawa. Begitupun aristokrasi di Sulawesi Selatan terhindar dari keharusan memikul tanggungjawab yang berat akibat berkolaborasi dengan Jepang.

Pada masa penjajahan Jepang hanya dalam waktu tiga tahun malah membuat semakin memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat. Di sisi lain, masuknya Jepang ke Sulawesi Selatan, membuat keadaan organisasi pergerakan yang belum sepenuhnya mapan menghadapi masa-masa kehidupan yang suram. Namun, pada bulan-bulan akhir pendudukan Jepang, tampak perkembangan yang mewarnai kehidupan organisasi pergerakan di Sulawesi Selatan. Kesejahteraan rakyat berangsur-angsur mulai membaik setelah kemerdekaan dan pulihnya keamanan daerah ini dari gangguan serta ancaman sia-sia kolonialisme.[[23]](#footnote-23)

1. **Kondisi Sulawesi Selatan Masa Orde Lama Tahun 1946-1950**

Setelah jepang menyerah pada sekutu, dan indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tangal 17 Agustus 1945, Sulawesi Selatan masuk dalam bagian provinsi Sulawesi yang dibentuk bersama provinsi lainnya di Indonesia tanggal 19 Agustus 1945.

Sebelum para tokoh pergerakan di Sulawesi Selatan membentuk pemerintahan, tentara sekutu (Australia) di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Iwan Dougherty mendarat di Makassar pada tanggal 23 september 1945. Kedatangan pasukan sekutu tersebut di ikuti oleh *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA) di pimpin oleh Mayor Wegner yang bermaksud menegakkan kembali pemerintahan sipil Hindia Belanda. NICA kemudian membangun organisasi bersenjata yang anggotanya terdiri dari eks tentara Belanda dari *Koninklijk Nederlansch Indisch Leger* (KNIL).

Pada tanggal 2 Oktober 1945 serdadu KNIL menembaki orang yang memakai celana merah putih. Peristiwa ini mengakibtkan para pemuda Sulawesi Selatan Memberontak. Pemberontakan terus berlangsung sampai akhir tentara sekutu (Australia) melarang serdau-serdadu NICA keluar dari kemp-kemp mereka.[[24]](#footnote-24)

Situai dan kondisi di Sulawesi Selatan bertambah buruk setelah pimpinan sekutu, Brigadir Jenderal Iwan Dougherty digantikan oleh Brigadir Jenderal Cilton serta komandan NICA Mayor Wegner diganti Dr. Lion Cocher yang lebih agresif. Kemudian NICA melakukan gerakan sampai ke wilayah pedalaman Sulawesi Selatan. Beberapa daerah seperti Maros, Pangkajene, Jeneponto, Takalar dan Bulukumba masih tetap bertahan untuk tidak bekerjasama dengan NICA. Kondisi keamanan di Sulawesi Selatan semakin tegang, pemberontakan terhadap NICA terjadi di mana-mana. Namun, Dr. Sam Ratulangi berhasil membentuk Badan Pusat Keselamatan Rakyat (BPKR), akan tetapi pada tanggal 24 April 1946 Gubernur Dr. Sam Ratulangi dan kawan-kawan ditangkap oleh Belanda dan di buang ke Serui pada bulan Juni 1946, kegiatan perjuangan fisik di Sulawesi Selatan berubah menjadi gerakan gerilya. Sedangkan perjuangan nonfisik dilakukan melalui wadah partai-partai dan organisasi legal.

Berbagai usaha perlawanan terhadap usaha Belanda (NICA) untuk kembali berkuasa di Sulawesi Selatan juga bermunculan, dan perlawanan terjadi di berbagai daerah, perlawanan terjadi juga di Luwu bulan Januari 1946, dan di Palopo 23 Januari 1946, dll. Menjelang akhir tahun 1946 suatu peristiwa pembantaian yang dilakukan Westerling meminta korban tidak kurang 40.000 nyawa, menjadi tragedi hitam yang mewarnai Sulawesi Selatan.

Pada tanggal 2 april 1946 dibentuk suatu organisasi militer khusus Lipang Badjeng yang di kepalai Ranggong Daeng Romo. Lipan Badjeng merupakan inti dari kelompok-kelompok pemuda/laskar, Lapris. Ranggo Daeng Romo sangat berjasa dalam mengadakan perlawanan dengan memimpin 57 aksi militer atas nama Lipan Badjeng, dan 51 nama Lapris selama kurun waktu Desember 1945 sampai Februari 1947. [[25]](#footnote-25)

Pada bulan februari 1946 mengusulkan pembuntukan suatu Negara Federal Indonesia Serikat (NIS) dalam hubungan persemakmuran dengan kerajaan Belanda. Pembicaraan tentang NIS dimulai dalam konferensi malino di Sulawesi Selatan pada tanggal 15-25 juli 1946 yang mengeluarkan keputusan untuk membentuk Negara Indonesia Serikat yang salah satu anggotanya adalah Indonesia bagian Timur. NIT yang diproklamasikan pada bulamn Desember 1946 di tengah-tengah kompanye pasifikasi yang dilancarkan Belanda di Sulawesi Selatan. Akhirnya NIT diterima di Republik maret 1947 dengan ditandatanganinya persetujuan Linggarjati.

Pembentukan NIT ternyata tidak menyurutkan perlawanan rakyat terhadap pemerintahan Belanda di Sulawesi Selatan baik fisik maupun non fisik. Sementara itu perundingan antara pemerintah Indonesia dengan Belanda yang diselenggarakan pada tanggal 23 Agustus- 2 November 1949 di Deen Haag, Belanda, yang menghasilkan Konferensi Meja Bundar (KMB) yang ditandatangani pada 27 Desember 1949 di Amsterdam oleh Ratu Juliana dan Wakil RIS Mohammad Hatta.

Selanjutnya pada tanggal 26 April 1950, Pemerintah Sulawesi Selatan yang diwakili oleh ketua Hadat Tinggi (Andi Idjo Karaeng Lalolang) yang juga adalah raja Gowa serta Andi Burhanuddin ketua dewan Sulawesi Selatan mengeluarkan proklamasi bahwa sesuai dengan keinginan rakyat, Sulawesi Selatan menarik diri dari NIT dan akan menggabungkan diri dengan Republik Indonesia sebagai suatu provinsi. Pembentukan Sulawesi Selatan terbentuk menjadi satu kesatuan wilayah administratif tingkat provinsi atas kemauan dan ikrar raja-raja serta masyarakat setempat.[[26]](#footnote-26)

1. Muh. Bachrum Sibali, *Perlawanan Rakyat Sulawesi Selatan Terhadap Penjajahan Belanda Pada Awal Abad Ke-20*, (Jakarta: Library Of Congress 1996), P. 6 [↑](#footnote-ref-1)
2. Anonim, *Citra Sulawesi Selatan Dalam Arsip*, (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia 2008, ) p 27 [↑](#footnote-ref-2)
3. Anonim, *Citra Sulawesi Selatan Dalam Arsip*,.. pp 28-29 [↑](#footnote-ref-3)
4. Muh. Bachrum Sibali, *Perlawanan Rakyat Sulawesi Selatan Terhadap Penjajahan Belanda Pada Awal Abad Ke-20*, (Jakarta: Library Of Congress 1996), P. 7 [↑](#footnote-ref-4)
5. Rasyid Asba*, Kopra Makassar Perebutan Pusat Dan Daerah: Kajian Sejarah Ekonomi Politik Regional di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), P. 64 [↑](#footnote-ref-5)
6. Heddy Shri Ahimsa Putra, Makalah*, Konteks Sosial-Budaya Demokrasi Di Sulawesi Selatan*, (Yogyakarta:Universitas Gajah Mada). https://intersksi.org.sosbud.demokrasi.sulsel, diunduh 27 mei, pukul 03:20 Wib [↑](#footnote-ref-6)
7. Anonim, *profil Propinsi Republik Indonesia:* *Sulawesi Selatan*, (Jakarta: Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara 2001), p 303 [↑](#footnote-ref-7)
8. Anonim, *profil Propinsi Republik Indonesia,..*P 304 [↑](#footnote-ref-8)
9. Anonim, *profil Propinsi Republik Indonesia*,.. p. 107 [↑](#footnote-ref-9)
10. Anonim, *profil Propinsi Republik Indonesia,..* p. 108 [↑](#footnote-ref-10)
11. Anonim, *profil Propinsi Republik Indonesia*,.. p. 304 [↑](#footnote-ref-11)
12. Anonim, *Profil Propinsi Republik Indonesia*,.. p. 111 [↑](#footnote-ref-12)
13. Anonim, *Citra Sulawesi Selatan*,.. p. 18-19 [↑](#footnote-ref-13)
14. Anonim, *profil Propinsi Republik Indonesia*,.. p. 305 [↑](#footnote-ref-14)
15. Najamuddin, Jurnal, “ Socia” Volume 11 Nomor 1, *Analisis Historis Terhadap Potensi Ekonomi di Sulawesi Selatan Indonesia Bagian Timur 1945-1949* (Makassar: Universitas Negeri Makassar). P 93 [↑](#footnote-ref-15)
16. Rasyid Asba*, Kopra Makassar*,.. P. ix-x [↑](#footnote-ref-16)
17. Rasyid Asba*, Kopra Makassar*,.. P, x [↑](#footnote-ref-17)
18. Nahdia Nur, Dkk*, Jurnal, Perdagangan Dan Ekonomi Di Sulawesi Selatan Pada Tahun 1900-An Sampai Dengan 1930-An, Vol 4, No 1* (Universitas Gajah Mada:2016) p. 621 [↑](#footnote-ref-18)
19. Nahdia Nur, Dkk*, Jurnal, Perdagangan Dan Ekonomi,..* P. 622 [↑](#footnote-ref-19)
20. Anonim, *profil Propinsi Republik Indonesia,..*p. 176 [↑](#footnote-ref-20)
21. Anonim, *Citra Sulawesi Selatan,..*p. 19 [↑](#footnote-ref-21)
22. Anonim, *Citra Sulawesi Selatan,..*p 20 [↑](#footnote-ref-22)
23. Anonim, *profil Propinsi Republik Indonesia*,.. P. 176 [↑](#footnote-ref-23)
24. Anonim, *Citra Sulawesi Selatan,.*. p. 21 [↑](#footnote-ref-24)
25. Anonim, *Citra Sulawesi Selatan,..* p. 22 [↑](#footnote-ref-25)
26. Anonim, *Citra Sulawesi Selatan,..* p. 23-24 [↑](#footnote-ref-26)